

Newsletter Guru Merdeka

Media Forum Komunikasi Guru-Guru Agama di Indonesia

Guru Merdeka

Forum Komunikasi Guru-Guru Agama di Indonesia

DARI REDAKSI:

Pertikaian yang melibatkan kekerasan antarkelompok yang menyertakan simbol-simbol keagamaan yang terjadi akhir-akhir ini telah menorehkan rasa tidak nyaman bagi umumnya masyarakat Indonesia yang sudah penat oleh persoalan ekonomi akibat kenaikan harga-harga.

Sebagai guru, betapa pun tidak menarik, situasi ini justru sangat penting untuk dijadikan bahan renungan dengan mencari berbagai cara memahami masalah kekerasan yang membingungkan ini. Pemahaman yang memberi alternatif gambaran tentang peran apa yang bisa dilakukan oleh kalangan pendidik khususnya dan para pemerhati pendidikan pada umumnya, agar masyarakat makin beradab dan berkeadilan. Karena bila sebagian besar masyarakat diam terhadap setiap peristiwa kekerasan, maka kekerasan akan terus berulang merusak sendi-sendi kehidupan bersama.

Newsletter edisi VIII ini khusus hanya memuat tulisan AA.GN Ari Dwipayana yang telah dibahas dalam pertemuan FKGA bulan Juni 2008 di SMA PIRI 1 Jogjakarta. Tulisan tersebut memberi alternatif cara memahami kekerasan yang melibatkan simbol-simbol agama dari sudut pandang psiko-sosiologi. Semoga newsletter ini bermanfaat.

Selamat membaca.

Pencerah :

Kekerasan 'Komunitas' Agama di Indonesia*

AA.GN. Ari Dwipayana**

PENGANTAR

Sebagai bagian dari fenomena global, di Indonesia, politik identitas terasa semakin jelas kentara terutama sejak kejatuhan rejim Soeharto pada bulan Mei 1998. Dalam politik identitas, pertanyaan yang paling penting adalah *who are we?* (siapa kami? Sehingga ada batas jelas siapa mereka).

Sehingga, berbagai komunitas dalam masyarakat akan merumuskan diri mereka sendiri dalam tema-tema kultural seperti kesamaan agama, bahasa, sejarah, nilai, kebiasaan dan lembaga. Setidaknya, bangkitnya kembali politik identitas ini terlihat dari munculnya dua gejala politik utama, pertama, terjadinya kerusuhan antar

*Tulisan ini adalah adaptasi dari makalah yang disampaikan sbagai pengantar diskusi dalam Seminar Sehari "Pluralisme, Konflik dan Perdamaian", yang diselenggarakan oleh Interfidei di Bengkulu, 6 September 2001.

**Staf Pengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIPOL UGM Yogyakarta dan Peneliti di Institute for Reasearch and Empowerment (IRE) Yogyakarta.

etnis di beberapa daerah seperti Kalimantan Barat, Maluku, Papua dan Kupang. Kedua, terjadinya tindak kekerasan dengan menggunakan sentimen-sentimen agama, seperti yang terjadi pada peristiwa Ketapang, Mataram, Kupang, serta Maluku.

Ada beberapa bentuk kekerasan politik agama yang terjadi di Indonesia. Pertama, kekerasan fisik seperti pengrusakan, penutupan tempat ibadah, seperti Gereja dan Mesjid maupun tindakan kekerasan fisik lainnya yang menyebabkan obyek kekerasan tersebut menjadi terluka, trauma maupun terbunuh. Bentuk kekerasan yang kedua adalah kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik ini dapat berupa kekerasan semiotik seperti berbentuk tulisan-tulisan yang bernada melecehkan sesuatu agama.

Pelaku tindakan kekerasan politik agama secara potensial bisa berasal dari setiap kelompok agama di Indonesia. Namun, belajar dari kasus-kasus yang muncul di Ketapang, Maluku, Poso, Mataram serta Kupang maka bisa ditemukan sebuah kecenderungan bahwasanya sebagian besar kekerasan politik agama yang timbul akibat konflik yang terjadi antara komunitas Islam dan komunitas Kristen. Di Maluku, misalnya, komunitas Islam dan Kristen teridentifikasi melalui ikat kepala dan identitas nama kelompok yang bertikai antara kelompok merah (obet) dan kelompok putih (acang).

Dari data statistik, Kabupaten/

Kota yang menjadi ajang pengrusakan Mesjid dan Gereja, dapat dilihat bahwa pengrusakan gereja terjadi di Kabupaten/ Kota yang prosentase penganut agama Islamnya mayoritas, sedangkan laju pertumbuhan umat Kristennya melebihi laju pertumbuhan umat Islam di daerah tersebut. Sebaliknya pengrusakan Mesjid terjadi di Kabupaten/ Kota yang prosentase penganut agama Kristennya mayoritas, sedangkan laju pertumbuhan umat Kristen di daerah tersebut. Misalnya di Kupang, prosentase umat Islam : Katolik : Protestan ialah 6,7 : 11,47 : 80,79. Laju pertumbuhan umat Islam : Katolik: Protestan ialah 9,18 : 6,53: -0,89. Laju pertumbuhan penduduk Kupang adalah 0,58. Namun ada juga kecenderungan konflik antar komunitas agama yang akhirnya bermuara pada kekerasan terjadi di daerah-daerah yang mempunyai komposisi agama secara demografis berimbang.

Dalam perspektif historis terlihat bahwa kekerasan politik agama merupakan fenomena khas Orde Baru. Ini terlihat dari data Thomas Santoso (2000:4) yang memperlihatkan bahwa pada masa Orde Lama hampir tidak ada kerusuhan yang berlatar belakang agama seperti pengrusakan gereja. Pada kurun waktu 1945-1966, hanya terdapat dua gereja yang dirusak, itupun terjadi di daerah-daerah yang mengalami gejolak politik dan keamanan bertalian dengan gerakan Darul Islam.¹

Sedangkan pada masa Orde Baru (1966-1998) tercatat tidak kurang dari 456 gereja dirusak, ditutup maupun diresolusi. Perusakan gereja yang terjadi setelah 21 Mei 1998 dapatlah dikatakan sebagai epilog atau warisan Orde Baru. Dalam kurun waktu 1996 sampai dengan akhir April 2000 tercatat 473 gereja dirusak, ditutup atau diresolusi.

Dari 473 gereja (100%) tersebut dapat dipilah atas tahun dan tempat kejadian, denominasi gereja dan bentuk kekerasan fisik serta simbolik. Pada tahun 1996 tercatat 71 gereja (15,01 %) dirusak, dibakar dan diresolusi, selanjutnya tahun 1997 tercatat 92 gereja (19,45 %), tahun 1998 tercatat 134 gereja (28,33%), tahun 1999 tercatat 123 gereja (26 %) dan tahun 2000 tercatat 53 gereja (11,2%).

MENGAPA TINDAK KEKERASAN POLITIK AGAMA TERJADI ?

Salah satu penjelasan yang menarik diberikan oleh pendekatan psikologis, yang berasumsi bahwa semua fenomena politik, termasuk tindak kekerasan politik agama, bermula dari pikiran manusia. Berdasarkan asumsi tersebut upaya menemukan penyebab dasar kekerasan politik dipusatkan pada faktor psikologis yaitu perasaan dan kesadaran orang mengenai kekecewaan.

Secara ringkas, argumennya adalah bahwa kekerasan politik pada tataran

komunitas itu terjadi karena perasaan frustrasi yang mendalam dan meluas di kalangan masyarakat. Terutama dalam wujud ketidaksesuaian antara *value expectation* masyarakat (yaitu harapan akan barang-barang atau kondisi hidup yang diyakini sebagai hak) dengan *value capability* mereka (yaitu barang-barang atau kondisi yang mungkin akan mereka peroleh atau kemampuan sistem untuk memungkinkan orang memperoleh barang-barang dan kondisi yang mereka inginkan). Kondisi itulah yang menimbulkan frustrasi (Gurr:1970). Jika intensitas kekecewaan semakin tinggi dan menyentuh berbagai lapisan, termasuk kaum penguasa, maka kekerasan politik yang muncul akan semakin meluas dan dalam bentuk yang canggih. Dengan kata lain kekecewaan masyarakat terhadap situasi dan perlakuan yang tidak adil merupakan motif utama tindakan kekerasan politik seperti kerusuhan berdasarkan agama.

Namun, timbul pertanyaan lebih lanjut: Apakah kerusuhan yang timbul di Ketapang, Maluku dan Kupang hanya sekedar cerminan kekecewaan material? Apakah tidak ada persoalan yang bersifat non material ? Jawaban atas pertanyaan ini bisa ditemukan dalam pandangan tentang "Religious-nationalism" yang para pendukung terbagi dua aliran.

Pertama aliran *Primordialist* mengajukan argumen bahwa banyak

gerakan politik berbasis agama muncul sebagai perwujudan dari tradisi kultural yang berdasarkan pada perasaan kesamaan identitas keagamaan secara turun temurun. Motivasi utama tindakan politik mereka adalah memelihara identitas kultural itu, seperti adanya ungkapan 'kita dan mereka', ungkapan 'kemurnian ajaran agama', ungkapan 'bahaya misionaris atau dakwah' dan sebagainya.

Kedua, aliran *situasionalist-instrumentalist* yang menafsirkan gerakan suatu kelompok keagamaan sebagai respon terhadap kebijakan pilih kasih, serta ancaman terhadap eksistensinya. Jadi, dalam kerangka pemikiran kaum *instrumentalist* ini, isu agama merupakan sesuatu yang bisa dikondisikan, oleh kelompok-kelompok komunal maupun elitnya. Dengan demikian, mereka berpolitik dengan menggunakan simbol-simbol agama dengan tujuan untuk memberikan tanggapan terhadap situasi dan relasi yang tidak adil dari aktor lain, baik terhadap negara maupun kelompok komunal lainnya. Penggunaan simbol-simbol agama itu di dasarkan pada alasan praktis, yaitu sarana efektif untuk menimbulkan dukungan emosional.

Pemikiran kalangan *instrumentalist* mirip dengan pendapat Charles Tilly (1978), yang melihat gerakan politik sebagai hasil dari hitung-hitungan para elite yang memobilisasi sumber daya kelompok untuk menanggapi peluang politik yang berubah. Dengan kata lain, kekerasan politik terjadi bukan karena ekspresi

emosional masyarakat, tetapi merupakan tindakan terencana dan terorganisasi untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Ringkasnya, kekerasan politik merupakan hasil hitung-hitungan politik.

Berdasarkan alur pemikiran di atas dapat dikatakan terdapat dua kubu tentang penyebab kekerasan. Kubu pertama, berpendapat bahwa tindakan kekerasan merupakan reaksi emosional terhadap gangguan dari luar. Kubu kedua, menyatakan bahwa tindak kekerasan merupakan hasil dari strategi dan keputusan taktis sekelompok elit.

Untuk memberi jembatan teoritik terhadap dua kubu tersebut, kita bisa kembali pada pendapat Theda Skocpol (1991). Menurut Skocpol, mobilisasi politik akan ditentukan oleh dua faktor: pertama, adalah faktor yang memberi landasan dasar bagi mobilisasi dan menentukan jenis tuntutan para elite gerakan yakni berupa perasaan kecewa/frustrasi akibat perlakuan yang tidak adil serta perasaan identitas kelompok. Kalau kekecewaan masyarakat tidak cukup parah dan identitas kelompok tidak cukup kuat, maka para elite gerakan komunal tidak punya bahan/ sarana untuk menanggapi ancaman atau peluang yang datang dari luar kelompoknya. Sebaliknya kalau kekecewaan mendalam dan meluas, diimbangi dengan penguatan identitas dan kepentingan kelompok, tersedialah kondisi bagi munculnya kekerasan kolektif. Kedua, adalah kemampuan untuk melakukan mobilisasi politik. Perasaan

¹.Karena keterbatasan sumber data, tulisan ini hanya menampilkan data-hanya tindak kekerasan terhadap komunitas Kristen.

frustasi akan berhenti hanya pada tingkat perlawanan tersembunyi dan tidak akan menimbulkan tindak kekerasan kalau tidak ada kemampuan komunitas untuk melakukan mobilisasi atas konflik yang terjadi. Mobilisasi itu berujud proses mendorong anggota kelompok atau masyarakat lainnya agar bersedia mengorbankan tenaga dan sumberdayanya untuk melakukan tindakan bersama demi kepentingan komunitasnya.

LATAR BELAKANG KONDISI-KONDISI PEMICU

Ketika ada pandangan bahwa tindak kekerasan dimulai dengan adanya faktor yang melatarbelakangi mobilisasi politik, maka pertanyaan berikutnya adalah apa yang mendorong adanya perasaan kecewa serta menguatnya identitas kelompok?

Jawaban atas pertanyaan ini mungkin sangat panjang dan variatif. Namun, setidaknya ada beberapa penjelasan untuk itu. Pertama, seberapa parah tingkat perbedaan ekonomi, keterbelakangan sosial dan penderitaan kolektif kelompok komunal tersebut dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Semakin besar perbedaan kondisi antar kelompok semakin kuat alasan untuk kecewa dan semakin kokoh persepsi bahwa mereka mempunyai kepentingan bersama untuk tindakan kolektif. Kedua, ketegasan identitas dan ikatan kelompok. Kekuatan untuk mengartikulasi kekecewaan akan tergantung pada kekuatan identitas dan

mobilisasi kelompok. Dengan demikian, penggunaan simbol-simbol bersama dan upaya untuk merumuskan perbedaan yang tegas antara kita dan mereka menjadi faktor yang kondusif bagi gerakan politik. Semakin besar perbedaan dalam hal-hal yang simbolik maka semakin besar potensi untuk terjadinya konflik.

Salah satu pemicu penguatan frustasi dan identitas kelompok adalah terbentuknya konfigurasi sosial yang terkonsolidasi. Tataan sosial disebut makin menguat apabila pemilihan sosial yang berdasarkan ukuran jumlah (suku-agama) jumbuh dengan pembentukan tataan sosial berdasarkan ekonomi dan struktur pekerjaan. Misalnya, suku A, umumnya memeluk agama A, dan sebagian besar menguasai struktur ekonomi A. Sebaliknya, ada suku B, yang beragama B dan menguasai sektor ekonomi B. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia, seperti NTT, Kalimantan Barat dan Maluku, struktur pekerjaan melekat pada agama dan etnis tertentu.

Dengan demikian struktur ekonomi dan peta pendudukan (berkaitan dengan jumlah laki-laki perempuan, jumlah penganut agama maupun jumlah suku) menjadi suatu penjelasan yang penting dalam menyelesaikan kondisi-kondisi yang melatarbelakangi perasaan frustasi dan penguatan identitas. Kasus tragedi Maluku merupakan contoh yang gamblang tentang hal ini. Maluku, khususnya Ambon, sejak jaman kolonial terbangun pemilahan

masyarakat atas dasar agama. Perbedaan agama muncul tidak hanya sebagai perbedaan identitas akan tetapi menjadi sebuah perbedaan ruang. Ada kampung yang disebut kampung muslim, sebaliknya ada kampung Kristen. Pemilahan masyarakat juga terjadi dalam lapangan pekerjaan, birokrasi dikuasai oleh Kristen sedangkan Perdagangan dikuasai oleh Muslim.

Sejak Orde Baru, terjadi perubahan konfigurasi sosial secara demografis akibat proyek modernisasi sosial-ekonomi. Keseimbangan yang sebelumnya terbangun menjadi tergoyahkan terutama sebagai akibat arus migrasi. Migrasi ke Ambon semakin meningkat tiga puluh tahun belakang ini dan menyebabkan hadirnya etnis Bugis Makasar dan Buton mengisi kekosongan struktur ekonomi Ambon. Mobilitas vertikal juga terjadi di kalangan komunitas Muslim sehingga banyak kalangan Muslim yang mengisi jabatan-jabatan publik serta menguasai sektor ekonomi.

Perubahan komposisi sosial-ekonomi inilah yang kemudian menimbulkan pikiran adanya kelompok yang menjadi "the winner" ('pemenang') dan "the looser" ('kalah'). Situasi ini mengkondisikan munculnya frustasi sosial kemudian berlanjut pada penegasan identitas kelompok. Seperti yang disampaikan dalam data tentang karakteristik kekerasan berupa perusakan masjid atau gereja terjadi di daerah dimana laju pertumbuhan penduduk antara

minoritas dan mayoritas tidak seimbang.

Penguatan identitas juga dipicu oleh modernisasi yang justru melahirkan anak haram berupa militansi dan fundamentalisme yang melawan sekularisme dan modernisme. Identitas teraktualisasi dalam istilah Obet (dari Robert nama untuk Kristen) dan Acang (dari Hasan nama untuk Islam). Fondasi konflik yang sudah terbentuk kemudian menjadi konflik yang mengemuka ketika elite kedua kelompok komunal memobilisasi komunitasnya untuk melakukan tindakan kolektif melalui sejumlah strategi.

DEMOKRASI DALAM MASYARAKAT MAJEMUK

Walaupun tulisan ini berpihak pada pendapat yang mengatakan bahwa konflik agama bukan konflik identitas semata dengan memperhatikan perubahan situasi kependudukan dan ekonomi, mobilisasi politik elite dan lain-lainnya. Konflik tidak akan menjadi sebuah kekerasan politik apabila demokrasi secara prosedural dan substantif bisa bekerja untuk mengelola berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat.

Elemen apakah yang membuat demokrasi bisa bekerja? modal sosial (*social capital*) adalah elemen yang penting untuk menuju masyarakat yang demokratis. Modal sosial adalah apa yang disebut sebagai serangkaian pengelompokan antar warga yang di dalamnya terdiri atas

jaringan-jaringan sosial dan norma-norma terkait yang mempunyai pengaruh positif terhadap pembangunan komunitas. Modal sosial itu berperan sebagai fasilitator terbangunnya koordinasi, kerjasama bagi komunitas dalam mewujudkan kehidupan sosial. Semakin banyak asosiasi horisontal dan bahan interaksi antar asosiasi dan warga dalam komunitas maka semakin tinggi warga mempunyai kemampuan dalam menerapkan demokrasi (Richard Wilk, 1996).

Modal sosial merupakan suatu kekuatan untuk mewujudkan komunitas humanistik. Kemampuan komunitas warga mewujudkan terlembaganya kesepakatan-kesepakatan melalui musyawarah, kesetaraan secara politis, solidaritas, kepercayaan (*trust*), toleransi serta struktur sosial yang mementingkan kerjasama antarwarga. Dengan demikian demokrasi muncul apabila adanya perasaan toleransi, saling menghargai dan mempercayai (*mutual trust*) satu sama lainnya.

Tentu saja ada pertanyaan lanjutan yang cukup sulit setelah itu; bagaimana mengembalikan *mutual trust* yang sempat goyah akibat pertikaian antar komunitas Agama? Bagi saya, jawaban atas pertanyaan itu tidak mudah. Namun, ada beberapa usaha yang bisa dibangun untuk merintis kembali *mutual trust* antar komunitas Agama;

Pertama, mengembalikan *mutual trust* akan tergantung pada kemampuan

kita untuk memulai kembali upaya rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini sangat dekat hubungannya dengan proses 'mengingat' dan 'melupakan' masa lalu. Sehingga, untuk membangun kembali saling kepercayaan antarkomunitas agama diperlukan kehendak untuk 'melupakan' hubungan-hubungan yang buruk (pertikaian) di masa lalu dan bahkan bersedia untuk meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat dalam sejarah.² Proses 'melupakan' itu juga harus diikuti dengan proses 'mengingat' hubungan-hubungan harmonis yang terjadi dalam sejarah, baik dilihat dari kesamaan asal-usul, kekerabatan maupun berkebudayaan.

Kedua, *mutual trust* akan bisa terbangun apabila terjadi dialog-dialog yang melibatkan sebanyak mungkin kalangan antar komunitas agama untuk berbagai isu yang dianggap sensitif. Dialog dibangun, atas dasar keterbukaan, kesetaraan, pembebasan dan tidak dipenuhi oleh apa yang sering disebut dengan prasangka dan pemberian cap-cup buruk pada komunitas lain.

Ketiga, *mutual trust* akan bisa terbangun apabila ada 'proyek bersama' di masa depan yang ingin diwujudkan. Di jaman revolusi kemerdekaan, berbagai komunitas agama bisa bersatu karena harus mewujudkan negara-bangsa yang bebas dari kolonialisme maka pada masa kekinian, komunitas agama seharusnya bersatu dalam menghadapi masalah-masalah kemanusiaan yang harus

dihadapi.[]

².Saya kira semangat rekonsiliasi ini dikedepankan oleh Paus Paulus II ketika beliau meminta maaf atas kesalahan Gereja di masa lalu, baik pada kaum Yahudi maupun Gereja Ortodox.

Pengelola:

Redaksi: Listia, Purwono, Sartono, Anis Farikhatin dan Suhardiyanto SJ.

Sekretaris Redaksi: Dian Mutianingrum

Bendahara: Eko Putro Mardiyanto

Alamat: Banteng Utama 59, Jln Kaliurang Km. 8 Sinduharjo, Ngaglik Sleman, Yogyakarta 55581 Telp. (0274) 880149 Fax: (0274) 887864 Website: <http://guru-merdeka.blogspot.com>

Redaksi menerima sumbangan tulisan tentang Pendidikan Agama